

## Pengembang Minta WNA Bisa Miliki Properti

### Pengembang Minta WNA Bisa Miliki Properti

Pengembang berharap kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia bisa dibuka. Para pengembang sangat mendukung kebijakan yang akan menggairahkan pasar properti nasional tersebut.

Presdir PT Pakuwon Darma Richard Adisastra mengatakan pihaknya menyetujui jika keran jual beli properti kepada pihak asing dibuka. "Dengan adanya pembukaan itu, asing akan meramaikan pasar properti lokal," ujarnya saat ditemui kemarin (12/11).

Dia menjelaskan, pasar properti lokal akan berkembang pesat. Selama ini bagi pihak asing penggunaan properti masih terbatas pada hak pakai bangunan selama 25 tahun.

Sedangkan untuk pembangunan properti di luar negeri, menurut dia bergantung pada pemerintah. "Return of investment-nya bisa lebih cepat untuk negara berkembang karena lahan terbukanya masih banyak," paparnya. Sedangkan untuk negara maju lebih selektif dalam memberikan izin ke investor.

Di Indonesia khususnya Surabaya, kata Richard, promosi penjualan properti oleh pengembang asing masih relatif sedikit. Sampai saat ini pun masih belum terlalu berpengaruh terhadap pasar lokal. Meski ada juga konsumen dari Indonesia yang membeli properti di Singapura maupun Malaysia. "Kalau Jakarta sedikit banyak cukup berpengaruh," katanya.

Namun, menurut dia, pembelian properti di luar negeri cukup membantu pebisnis lokal yang memiliki usaha di negara itu. Sementara itu, Pakuwon sendiri hingga kini masih fokus menggarap pasar lokal. "Kami masih yakin dengan pasar Indonesia masih cukup besar untuk dikembangkan," ucapnya. Pihaknya pun hingga kini belum melirik negara lain untuk ekspansi.

Berbeda dengan Pakuwon Group, PT Ciputra Surya saat ini mulai menjajaki ekspansi ke luar negeri. Salah satunya menjajaki Tiongkok. Direktur PT Ciputra Surya Tbk Sutoto Yakobus mengatakan pihaknya telah melakukan ekspansi ke Vietnam, dan sekarang ini sedang mempelajari kultur bisnis properti di negeri tirai bambu itu. "Pemerintah Tiongkok sangat mendukung bisnis properti dengan menyediakan terlebih dahulu infrastruktur baru kemudian di tender kepada pengembang," paparnya.

Selain itu pemerintah Tiongkok pemberian batas waktu pembangunan dengan jelas. "Bila pengembang molor akan dikenakan denda," katanya. Indo Pos, 13/11/2007